BAB II

Literasi Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, dan *Sharia Financial Inclusion*

A. Tinjauan tentang Literasi Keuangan Syariah

1. Konsep Literasi Keuangan

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya melek keuangan, menurut buku podoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.[1] Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

OECD-INFE mendefinisikan melek keuangan (*financial literacy*) sebagai berikut: "*A combination of awareness, knowledge, skill, attitude and behaviour necessary to make sound financial decisions and*

[1] Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan", Direktorat Literasi dan Edukasi (2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ultimately achieve individual well being." Melek keuangan adalah suatu kombinasi kesadaran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan keuangan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran individu.[2]

Literasi keuangan berkaitan dengan kompetensi seseorang untuk mengelola keuangan. Definisi literasi finansial menurut Vitt *et. al* :

> *Personal financial literacy is the ability to read, analyze, manage and communicate about the personal financial condition that affect material well-being. It includes the ability to discern financial choices, discuss money and financial issues without (or despite) discomfort, plan for the future and respond competently to life events that affect everyday financial decisions, including events in the general economy.*[3]

Literasi finansial terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Huston menyatakan bahwa pengetahuan finansial merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi finansial, namun belum dapat menggambarkan literasi finansial.[4]

Definisi dasar literasi keuangan menurut Remund berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola dananya. Konsep ini awalnya tidak dideskripsikan sebagai sebuah literasi keuangan, tetapi gagasan ini ada di awal tahun 1900 bersamaan dengan sebuah penelitian

---

[2] Isnurhadi, "Kajian Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah: Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang", eprints.unsri.ac.id (2013). 7-8.
[3] Huston, S.J, "*Measuring Financial Literacy*", Journal of Consumer Affairs Volume 44 Issue 2 (2010). 311.
[4] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan pendidikan terhadap konsumen yang ada di Amerika. Literasi keuangan secara khas diperhitungkan dalam level individual lalu berkembang menjadi kelompok-kelompok, seperti siswa sekolah atau para pegawai yang berpenghasilan rendah, sebagai gambaran ekonomi makro.

> *By the most basic definition, financial literacy relates to a person's competency for managing money. The concept has not always been described as financial literacy, but the idea dates to the early 1900s and the advent of consumer education research and initiatives in the United States (Jelley 1958). Financial literacy is typically measured at the individual level and then aggregated by groups, such as high school students or low-income adults, to provide a macroview.*[5]

Menurut penelitiaanya yang dimulai sejak tahun 2000, Remund menyatakan lima kategori tentang definisi konseptual mengenai literasi keuangan: (1) pengetahuan terhadap konsep keuangan, (2) kemampuan untuk berkomunikasi mengenai konsep keuangan, (3) ketangkasan dalam mengelola keuangan pribadi, (4) kemampuan di dalam membuat keputusan keuangan yang tepat, (5) kemampuan dalam merencanakan keuangan masa depan yang efektif sesuai yang dibutuhkan.

> *Based upon a review of research studies since 2000, the many conceptual definitions of financial literacy fall into five categories: (1) knowledge of financial concepts, (2) ability to communicate about financial concepts, (3) aptitude in managing personal finances, (4) skill in making appropriate financial decisions and (5) confidence in planning effectively for future financial needs.*[6]

---

[5] David L. Remund, "*Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy*", The Journal of consumer Affairs volume 44, No 2 (2010), 279.
[6] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kesimpulan definisi tentang konsep literasi keuangan, Remund merekomendasikan sebuah definisi konseptual mengenai *financial literacy*.

> *Financial literacy is a measure of the degree to which one understands key financial concepts and possesses the ability and confidence to manage personal finances through appropriate, short-term decision-making and sound, long-range financial planning, while mindful of life events and changing economic conditions.*[7]

Literasi keuangan merupakan sebuah langkah atas sebuah tingkatan yang mana dapat memahami konsep dari keuangan dan proses dari sebuah kemampuan untuk mengurus keuangan pribadinya secara tepat, baik dalam jangku waktu pendek, sedang, maupun seumur hidup dan merubah kedaaan ekonominya.

Dapat dipahami dari berbagai konsep tersebut, menurut penulis literasi keuangan merupakan sebuah kesadaran pada masyarakat dalam mengelola dana miliknya berdasarkan pengetahuan yang didapatkannya. Sehingga kesadaran tersebut berbuah pada sikap dan tingkah laku yang diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan mereka.

Literasi keuangan merupakan hal pokok dalam pembangunan jangka panjang ekonomi sebuah negara. Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pun telah diluncurkan pada November 2013 yang lalu. Sebuah penelitian di Malaysia menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan faktor yang menentukan seseorang

[7] David L. Remund, "*Financial Literacy Explicated*", 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menabung di lembaga formal. Pendidikan dasar akan literasi keuangan harus ditingkatkan kepada kelompok rumah tangga.

> *Saving is essential for the long-term development and economic growth of a nation. In addition, saving acts as a contingency for individuals and countries in the event of economic downturns and financial crisis. This paper has examined the factors that influence individual saving with a focus on financial literacy, in the Malaysian context. Overall, this study has shown the financial literacy is an important determinant of individual saving. Financial literacy, which is defined as individuals' knowledge about basic and advanced financial topics, such as knowledge/computation on interest rate, inflation rate, percentage calculation, stocks, and unit trusts, has been found to be positively related to the probability of having positive saving amongst individuals, ceteris paribus. This result, although a preliminary finding from this exploratory research, suggests that if the government aims to increase saving amongst households, it should increase efforts in promoting financial literacy through basic educational programs regarding financial issues.*[8]

Pada penelitian yang dilakukan oleh Irin Widayanti pada tahun 2012, selain pendidikan pengelolaan keuangan keluarga yang berpengaruh positif signifikan terhadap literasi keuangan aspek sikap, terdapat faktor lain yakni pembelajaran di perguruan tinggi yang berpengaruh langsung positif signifikan terhadap literasi keuangan aspek kognitif. Dari berbagai pernyataan tersebut, dipastikan bahwa literasi keuangan mempunyai pengaruh yang *compatible* terhadap pengelolaan keuangan seseorang.

Rata-rata jawaban yang benar dikelompkan menjadi tiga kategori yaitu rendah (<60), sedang (60≤80), dan tinggi (>80) untuk

[8] N.S. Mahdzan and Saleh Tabiani, "*The Impact of Financial Literacy on Individual Saving: An Exploratory Study in The Malaysian Context*", Transformation in Business & Economics, Vol 12, No 1 (28), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan pengamatan. Metode ini merujuk kepada penelitian sebelumnya oleh Chen dan Volpe pada tahun 1998 serta penelitian Darman dan Sadalia pada tahun 2012 dimana jawaban yang benar dihitung dan dipersentasekan terhadap jumlah informan.

Sejauh ini pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan umunya menggunakan desain kuesioner dalam bentuk pengetahuan umum tentang tabungan dan pinjaman, asuransi dan investasi. Lusardi menggunakan konsep pengukuran pemahaman dasar keuangan meliputi; (i) menghitung dan memahami tentang suku bunga dan bunga majemuk; (ii) memahami inflasi; dan (iii) memahami difersifikasi risiko, sementara bunga atau riba tidak dibenarkan dalam Islam, oleh karenanya ukuran tersebut tidak dapat dituangkan dalam mengukur literasi keuangan bagi umat muslim. Di Indonesia sendiri belum ditemukan penelitian yang mengukur tingkat literasi keuangan khususnya di masyarakat muslim dan juga belum ada studi yang menemukan model pengukuran yang dapat mengkaitkan aturan-aturan muamalah tentang sumber dan pemanfaatan dana seperti tentang larangan maysir, gharar dan riba. Model pengukuran yang tepat tentunya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran literasi keuangan untuk menentukan pada tataran mana solusi literasi itu harus diatasi.[9]

[9] Rike Setiawati, "Literasi Keuangan Islam: Suatu Telaah Literatur", (t.tp: tp, t.t), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi-Misi Strategi Nasional Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia sudah menetapkan visi, misi dan prinsip literasi keuangan. Menurut OJK visi literasi keuangan Indonesia adalah: "mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan."[10]

Adapun misi dari literasi keuangan Indonesia yakni: (1) melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas; dan (2) meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan. Agar program peningkatan literasi keuangan Indonesia kepada masyarakat berjalan dengan baik maka setiap program literasi harus memiliki prinsip sebagai berikut:[11]

a. Inklusif : mencakup semua golongan masyarakat.
b. Sistematis dan terukur : literasi keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.
c. Kemudahan akses : layanan dan informasi keuangan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.

[10] Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi..", 20.
[11] Ibid,. 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kolaborasi : melibatkan seluruh stakeholders secara bersama-sama dalam mengimplementasikan literasi keuangan.

3. **Prinsip Pembangunan Literasi Keuangan Syariah**

Menurut Agustianto tujuan dari upaya gerakan pembanguan literasi keuangan syariah adalah "*Pertama*, meningkatkan literasi keuangan seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah. *Kedua,* meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah." Dengan demikian, *maqhasid* (tujuan) dari leterasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yabg halal dan menguntungkan.[12]

Selain itu Agustianto juga mengemukakan prinsip pembangunan literasi keuangan syariah yang dikembangkan dari cetak biru strategi nasional literasi keuangan Indonesia. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[13]

---

[12] Agustianto, "Membangun Literasi Keuangan Syariah" bag 2, dalam http://www.agustiantocntre.com/?p=1674, "diakses pada" 21 Februari 2014.
[13] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Universal dan inklusif : program literasi keuangan syariah harus mencakup semua golongan masyrakat secara *rahmatan lil'alamin* terbuka untuk semua agama dan golongan.
b. Sistematis dan terukur : program literasi keuangan syariah disampaikan secara terencana, sistematis, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.
c. Kemudahan akses (*taysīr*) : layanan dan informasi yang terkait dengan literasi keuangan syariah tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.
d. Kemaslahatan : program literasi keuangan syariah harus membawa maslahah (manfaat) yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Kolaborasi : program literasi keuangan harus melibatkan sulurh *stakeholders* syariah dan pemerintah secara bersama-sama dalam perencanaan dan implementasinya.

4. Manfaat Pembangunan Literasi Keuangan Syariah

*Financial literacy (*literasi keuangan) merupakan salah satu program strategis yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat di berbagai negara dalam mewujudkan masyarakat yang melek mengenai jasa keuangan. Pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa literasi keuangan telah menjadi program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya, mengingat literasi keuangan memiliki berbagai manfaat. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberhasilan itu, maka Indonesia melakukan gerakan nasional pembangunan literasi keuangan. Bagi masyarakat dan rakyat Indonesia, program literasi keuangan syariah memiliki manfaat yang besar antara lain:[14]

a. Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka.
b. Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*financial planning*) secara syariah dengan lebih baik.
c. Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (bodong).
d. Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk serta jasa keuangan syariah.

Manfaat dari literasi keuangan diungkap oleh Upendra Singh yang melakukan penelitian *Financial Literacy* di India, menyatakan hal sama dengan data yang telah dipaparkan terlebih dahulu. Berikut kutipan dari hasil penelitiannya:

> *Financial literacy is a very complex concept and it is very difficult to understand the impact of financial literacy on society. In fact, as a part of society, we are yet to fully recognise the need and potential of financial literacy. The nature of financial illiteracy and its manifestations may vary, but it gets reflected in the everyday financial choices that many of us make. The lack of basic knowledge about financial instruments and their risk-return framework is one common instance of financial illiteracy that is widely observed. Retail investors are greedy to get higher return at very short time and most of them do not calculate the associated risk of financial product. Thus, appreciation of various aspects of*

[14] Agustianto, "Membangun Literasi Keuangan Syariah" bag 3, dalam http://www.agustiantocntre.com/?p=1676, "diakses pada" 21 Februari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *financial literacy and how it impacts our lives holds the key to prudent financial planning and welfare maximisation, both- at the individual level and for the society as a whole.*[15]

Terfokus kepada literasi keuangan syariah menurut pembahasan juga memiliki manfaat. Masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah saling membutuhkan sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Dalam hal ini potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan syariah juga semakin besar. Disamping itu, literasi keuangan syariah juga mendorong industry jasa keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan produk dan jasa keuangan yang lebih inovatif, bervariasi dan lebih terjangkau, sesuai dengan kebutuhan semua golongan masyarakat. Lembaga jasa keuangan syariah dapat mengidentifikasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang menguntungkan secara komersial sekaligus memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat, yang saat ini beum dapat memanfaatkan dan mengakses produk dan jasa keuangan syariah.[16]

Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi negara, tidak saja bagi OJK selaku pemegang otoritas tetapi juga bagi negara selaku eksekutif pemerintah yang menjalankan amanat UUD 1945 untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan

---

[15] Upendra Singh, "*Financial Literacy and Financial Stability are Two Aspects of Efficient Economy*", Journal of Finance, Accounting and Management, 5 (2), (Juli 2014), 66.
[16] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa keuangan berperan memberikan pelayanan permodalam, jasa keuangan, bahkan konsultasi keuangan syariah. Maju dan berkembangnya lembaga keuangan syariah akan berdampak bagi kesejahteraan negara. Apabila masyarakat telah melek *(literacy)* dalam keuangan syariah/*muamalah maliyah,* maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteran masyarakat adalah keberhasilan negara dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari aspek ekonomi makro sendiri, literasi keuangan syariah memberikan manfaat sebagai berikut:[17]

a. Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi secara syariah, diharapkan ekonomi Indonesia akan makin stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang riba (*bubble economy*), dan *maysir* (spekulasi). Kestabilan ekonomi keuangan akan mendorong ekspor dan investasi.
b. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan syariah, maka pertumbuhan sektor riil (*ta'alluq qiṭā'il māliyah bil qiṭā'il waqī'iyyah*).
c. Semakin banyak masyarakat yang menggunakn jasa keuangan syariah, maka ekonomi nasional akan semakin kokoh dan kuat dari terpaan badai krisis global.

[17] Agustianto, "Membangun Literasi Keuangan Syariah" bag 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Semakin banyak masyarakat yang *well literate* dalam keuangan syariah, maka akan semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan (keadilan) dan kesejahteraan sebagai implementasi Pancasila, yakni sila kelima.

e. Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi melalui lembaga keuangan syariah, diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meingkat.

f. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan syariah, maka diharpkan intermediasi di sektor keuangan akan semakin besar.

B. Perbankan Syariah

Ketika seorang bankir konvensional menanyakan perihal perbankan syariah, banyak yang mengira perbankan syariah merupakan hal yang tidak benar-benar ada. Dalam artian, perbankan syariah hanya sebuah oasis belaka. Faktanya perbankan syariah benar-benar ada dan menggunakan prinsip Islam serta aturan Islam yang sangat berbeda dengan perbankan konvensional.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Brian Kettell pada tahun 2008 mengatakan bahwa perbankan syariah merupakan sebuah layanan bank yang memiliki visi misi sesuai prinsip al-Qur'an. Perbankan syariah merupakan bagian yang terpisah dari perbankan konvensional. Perbankan syariah melakukan operasinya sesuai anjuran Islam yang melarang bunga (*riba*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah yang membuat dasar pemisah antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

> *Islamic banking is not about smoke and mirrors. It is in fact about banking based on Islamically-ethical principles which are, in many ways, very different indeed from conventional banking principles. So what exactly is islamic banking all about? Islamic financial institutions are those based, in their objectives and operations, on Qur'anic principles. They are thus set apart from conventional institutions, which have no such religious preoccupations. Islamic banks provide commercial services that comply with the religious injunctions of Islam. Islamic banks provide services to their customers free from interest (the Arabic term for which is riba). The giving and taking of interest is prohibited in all transactions. This prohibition makes an Islamic banking system differ fundamnetally from conventional banking system.*[18]

Lebih rinci, Ascarya 2007 mengatakan menabung di bank syariah bisa menjadi salah satu langkah perencanaan di masa depan. Produk-produk pendanaan/saving bank syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbun tabungan dan menuntut penggunaan dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukan tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, terutama *wadi'ah*, *qard*, *mudharabah*, dan

[18] Brian Kettell, "*Introduction to Islamic Banking and Finance: Definition of Islamic Banking*", A John Wiley and Sons, Ltd, Publication (2008), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijarah.[19] Keharaman *riba* sudah Allah frimankan dalam QS: Al-Baqarah (2) ayat 275 sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba[20] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[21]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[22] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[23]

Para ulama Islam berketetapan bahwa larangan riba bukankalah sekedar sebuah perintah agama, tetapi merupakan bagian integral dari ekonomi Islam yang mencakup etos, tujuan, dan nilai-nilai di dalamnya.

Perbankan syariah sendiri ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,

---

[19] Novia Nengsih, "Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia", Etikonomi: Jurnal UIN Jakarta Volume 14 (2), (Oktober 2015), 228-229.

[20] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[21] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[22] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

[23] al-Quran, 2:275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksaknakan kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip sayriah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).[24]

Bank syariah pertama di Indonesia dimotori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Pada periode 1992-1998 hanya ada satu bank syariah di Indonesia, sedangkan data terakhir pada tahun 2015 lalu terdapat bank umum syariah sebanyak 12 bank, unit usaha syariah sebanyak 22 bank dan bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 163 bank.[25]

Sedangkan di dalam latar belakang penulisan penelitian ini telah disodorkan data bahwa pangsa pasar bank syariah di Indonesia masih di bawah 10%, lebih tepatnya hanya 4,87% di awal 2016. Pangsa pasar bank syariah di Indonesia sendiri menurut *data Islamic Financial Standard Board* (IFSB) Indonesia menempati peringkat ke 19, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei yang menempati posisi ketiga dengan jumlah market share 49%. Disusul dengan Malaysia di posisi kedelapan dengan jumlah market share sebesar 23%.[26]

---

[24] Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencan Prenada Media Group, 2011), 32-33.
[25] Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Februari 2016), 4.
[26] Islamic Financial Service Industry Stability Report 2016, "*Development of the Islamic Financial Service Industry*", dalam www.ifsb.org (2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian yang dilakukan Kunt et.al pada tahun 2013 menghasilkan data bahwa sebanyak 5.000 orang dewasa yang berada di negara-negara Afrika Utara seperti Algeria, Mesir, Maroko, Tunisisa, dan Yaman, hanya 2 persen yang memilih menggunakan produk perbankan syariah. Secara keseluruhan hampir 45% responden melaporkan bahwa produk perbankan syariah lebih mahal dibandingkan dengan yang konvensional. Sedangkan sebanyak 37% responden menggunakan bank konvensional karena alasan harga.

> *However, in a smaller, separate dataset based on interviews with over 5,000 adults in five Middle Eastern and North African countries (collected in 2012), we are able to make the distinction between Sharia-compliant and conventional financial products. We find very little use of Islamic banking products though we do see evidence of a strong hypothetical preference for Sharia-compliant products despite higher costs. Just 2 percent of adults in these countries (Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia, and Yemen) report currently using a Sharia-compliant banking service. In a hypothetical scenario, a plurality (45 percent) of respondents reports a preference for a Sharia-compliant banking product over a less expensive conventional banking product. However, 37 percent of respondents prefer a conventional product or have no preference which suggests that demand for Sharia-compliant products is not immune to cost concerns.*[27]

Meskipun hasil penelitian Kunt dan kawan-kawannya tersebut tidak mempresentasikan perbankan Islam secara global, namun secara plural kebanyakan responden menyatakan lebih memilih produk perbankan karena harga yang ditawarkan.

> *And while a plurality of respondents do report a preference for Islamic banking services despite significantly higher costs, an almost*

[27] Asli Demirguc Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, "*Islamic Finance and Fianacial Inclusion: Meausring Use of and Demand for Formal Financial Services among Muslim Adults*", *Review of Middle East Economics and Finance 10.2* (Oktober 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

equally large share of adults prefer the cheaper, conventional loan or do not have a preference between the two. This suggests that there is likely to be demand for both conventional and Islamic banking services, and that preferences for Sharia-compliant products are influenced by price. Ideally, we would be able to estimate the elasticity of demand for Islamic products using an array of pricing options but this was not feasible in the current exercise. Finally, it should again be noted that these results are not representative of Islamic banking globally; in many countries, use of and attitudes towards Islamic finance are likely markedly different.[28]

Kendati demikian, tantangan perbankan syariah di tahun 2016 ini bukan hanya masalah harga yang kurang bersaing dengan perbankan konvensional. Menurut Agustianto dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah syariah menjadi pemain yang unggul dan berperan signifikan di Indonesia, terdapat beberapa isu penting dan strategis yang harus menjadi prioritas bagi *stakeholder* perbankan syariah. Di antaranya adalah inovasi produk, masalah sekuritisasi (*tawriq*) aset bank syariah, kualitas aset bank syariah, memperkuat permodalan dan skala usaha bank syariah, pendanaan (*funding*), penguatan SDM, dan yang terakhir meningkatkan teknologi sistem keuangan syariah.[29]

C. *Sharia Financial Inclusion*

1. Konsep Keuangan Inklusif

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan

[28] Ibid,. 19.
[29] Agustianto Mingka, "Tantang Perbankan Syariah 2016", dalam http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/tantangan-perbankan-syariah-2016 (Desember 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.[30]

Perbankan berperan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yakni untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif mengingat perbankan Indonesia memiliki *share* kegiatan keuangan sampai dengan 80%. Namun demikian keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga Pemerintah dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Berdasarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif didefinisikan sebagai: " Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman,

[30] Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, "Booklet Keuangan Inklusif", (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil."[31]

Radhika Dixit menggambarakan diagram keuangan inklusif sebagai berikut:

Gambar 2.1 Diagram Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif merupakan keadaan dimana tersampaikannya pelayanan keuangan, termasuk pelayanan perbankan dan kredit (pembiayaan), dengan harga yang terjangkau pada masyarakat luas yang memiliki pendapatan rendah. Berbagai pelayanan keuangan termasuk

[31] Ibid,. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menabung, pinjaman, asuransi, pembayaran dan fasilitas pengiriman yang disediakan oleh sistem keuangan.

> *By financial inclusion, we mean the delivery of financial services, including banking services and credit, at an affordable cost to the vast sections of disadvantaged and low-income groups who tend to be excluded. The various financial services include access to savings, loans, insurance, payments and remittance facilities offered by the formal financial system.*[32]

Menurut Mandira Salma pentingnya keuangan inklusif telah diakui secara luas, namun literatur tentang keuangan inklusif belum banyak yang meng*cover* secara komperhensif sejauhmana tingkat keuangan inklusif di seluruh negara. Beberepa indikator inklusi keuangan yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang berbeda. Indikator yang paling sering digunakan adalah penggunaan akun bank (per 100 orang dewasa). Beberapa yang lain menggunakan jaringan distribusi layanan keuangan (*branchless banking*) (per satu juta jiwa), pemilikan ATM (per satu juta jiwa), jumlah kredit (pembiayaan) dan jumlah deposito. Beberapa indikator, ketika digunakan secara individual hanya dapat menyediakan informasi secara parsial terhadap tingkat inklusi keuangan.

> *While the importance of financial inclusion has been widely recognised, the literature on financial inclusion lacks a comprehensive measure that can be used to measure the extent of financial inclusion across economies. Several indicators have been used to indicate the extent of financial inclusion by different people. The most commonly used indicator has been the number of bank accounts (per 100 adult persons). Some other indicators are number of bank branches (per million people), number of ATMs*

[32] Radhika Dixit, "Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian States", International Jurnal of Business Management Research, vol 3 (1) (Maret 2013), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *(per million people), amount of bank credit and amount of bank deposit. Such indicators, while used individually, can provide only partial information on the inclusiveness of the financial system of an economy.*[33]

Sedangkan indikator keuangan inklusif yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut: *Pertama*, ketersediaan/akses yakni mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga. *Kedua*, penggunaan yakni mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (a.l. keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan). *Ketiga*, kualitas yakni mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan. *Keempat*, kesejahteraan yakni mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.[34]

Gambar 2.2 Indikator Keuangan Inklusif oleh Bank Indonesia

Dimensi	Indikator	Keterangan
Akses	Jumlah akses poin per 10.000 penduduk dewasa di level nasional dan terbagi berdasarkan jenis dan unit administratif.	- Akses poin : Tempat melakukan transaksi *cash in/cash out* (Bank, ATM, agen/UPLK). - Jenis akses poin. - Unit administratif: provinsi dan kabupaten. - Jumlah penduduk dewasa adalah penduduk usia produktif (20 tahun ke atas).
	Persentase jumlah unit administratif yang memiliki minimal 1 (satu) akses poin .	Unit administratif: provinsi dan kabupaten.
	Persentase dari total populasi yang tinggal di suatu unit administratif yang memiliki minimal 1 (satu) akses poin.	Total populasi dalam provinsi dan kabupaten.
	Jumlah akses poin per 10 km^2	Akses poin : Tempat melakukan transaksi *cash in/cash out* (Bank, ATM, agen/UPLK).
Penggunaan	Persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki minimal satu jenis rekening simpanan (untuk negara yang tidak memiliki data ini dapat menggunakan jumlah rekening simpanan per 10.000 penduduk dewasa).	- Jumlah rekening simpanan per 10.000 penduduk dewasa. - Rekening simpanan: giro, tabungan, deposito berjangka.
	Persentase jumlah penduduk yang memiliki minimal satu jenis rekening pinjaman (untuk negara yang tidak memiliki data ini dapat menggunakan jumlah rekening pinjaman per 10.000 penduduk dewasa).	Jumlah rekening .pinjaman per 10.000 penduduk dewasa.

[33] Mandira Salma, "*Index of Financial Inclusion*", Indian Council f or Research on International Economic Relations (Des 2007), 4.
[34] Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, "Booklet Keuangan Inklusif", Bank Indonesia (2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Paramasivan yang melakukan penelitiannya di India pada tahun 2013, pertumbuhan keuangan yang inklusif hanya mungkin terjadi melalui mekanisme yang tepat dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat). Inklusi keuangan merupakan konsep inovatif yang membuat teknik alternatif untuk mempromosikan kebiasaan menggunakan bank kepada rakyat pedesaan.

> *"Inclusive growth is possible only through proper mechanism which channelizes all the resources from top to bottom. Financial inclusion is an innovative concept which makes alternative techniques to promote the banking habits of the rural people..."*[35]

2. **Visi dan Misi Keuangan Inklusif**

Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan sebagai berikut: "mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia." Visi keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:[36]

Tujuan 1: Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai

[35] C. Paramasivan, "Overview of Financial Inclusion India", International Journal of Management adn Development Studies Volume 2 (Maret 2013), 45.
[36] Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, "Booklet Keuangan Inklusif", 6-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

Tujuan 2: Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.

Tujuan 3: Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.

Tujuan 4: Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.

Tujuan 5: Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Tujuan 6: Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.

3. **Tinjauan tentang *Sharia Financial Inclusion***

Allah Swt dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 208 menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam agama Islam secara *kaffah* dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu."[37] Pada ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar memeluk Islam secara *kaffah*, yang dimaksud dengan *kaffah* adalah melaksanakan segala syariat Islam secara keseluruhan (totalitas) tidak memilah-milah antara aturan agama yang satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi apa yang tidak kita sukai menjadi hal yang buruk buat kita. Menindak lanjuti ayat tersebut, seharusnya sebagai ummat muslim masyarakat Indonesia tidak

[37] al-Quran, 02:208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan syariah untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka.[38]

Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah cukup lengkap. Mulai industri perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah. Selama dua dekade terakhir, tiga sektor industri jasa keuangan syariah tersebut telah menunjukan perkembangan cukup pesat.

Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Kunt et.al menyatakan bahwa semakin inklusif lembaga keuangan maka akan semakin besar peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan keuangan seperti halnya mereka mendapatkan tunjangan atau jaminan bagi orang-orang miskin dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

> *Yet little empirical research has been done to measure the degree to which Muslims are currently not accessing conventional financial systems, or how much they demand and use Sharia-compliant financial products, particularly within the realm of household finance. Even less is known about how these usage gaps and preferences vary between various financial products and across regions and countries. A more complete understanding of these concepts can help Islamic finance industry leaders better expand their outreach to Muslim clients, and aid policymakers in more clearly defining their role in expanding financial inclusion - Islamic or otherwise - to Muslim adults.*[39]

---

[38] Lucky Nugroho, "Financial Literacy dan financial Inclusion Vis a Vis Integrasi layanan Keuangan Syariah", dalam www.syariahfinance.com (Februari 2016), "diakses pada" Desember 2016.

[39] Asli Demirguc Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, "*Islamic Finance and Financial Inclusion.* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Bank Dunia 2014 GFDR sendiri menyajikan beberapa hasil yang menggembirakan, perbankan Islam ditemukan berhubungan positif dengan inklusi keuangan. Namun, penelitian lebih jauh yang dilakukan oleh Sami, Barajas, dan Massara tidak menemukan bukti bahwa ukuran dari industri keuangan Islam terkait dengan perbedaan inklusi keuangan antara Muslim dan non-Muslim.

> The World Bank 2014 GFDR *presents some encouraging results: Islamic banking is found to be positively related to financial inclusion; while Muslim countries in general tend to exhibit lower levels of financial inclusion, Islamic banking is associated with a lower incidence of religious self-exclusion and with a lower share of firms citing access to finance as a significant obstacle. However, there is also reason for caution. Using micro-level data,* Demirguc-Kunt, Klapper, and Randall (2013) *find that, once relevant individual characteristics are accounted for, although Muslims are less likely to have an account or save in a formal financial institution, they are no less likely to borrow from one, and the greater observed religious self-exclusion of Muslims seems to arise solely in sub-Saharan African countries. Furthermore, the authors do not find evidence that the size of the Islamic finance industry is related to differences in financial inclusion between Muslims and non-Muslims.*[40]

Menurut Bambang Brodjonegoro keuangan syariah dengan karakteristik yang mendukung adanya inklusifitas, kesetaraan, kerja sama dan keadilan bagi semua, bisa membantu pengurangan kesenjangan di antara negara berkembang. Program inklusi keuangan sendiri, merupakan agenda utama bagi negara berkembang karena bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Untuk itu, prinsip keuangan syariah yang

[40] Sami Ben Naceur, Adolfo Barajas, Alexander Massara, "*Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion*", IMF working Paper (Februari 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan program inklusi keuangan bisa saling bersinergi untuk meningkatkna kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[41]

[41] Satyagraha, "Menkeu: Penerbitan Sukuk Ritel Dukung Inklusi Keuangan" dalam antaranews.com/berita/561370/menkeu-penerbitan-sukuk-ritel-dukung-inklusi-keuangan (Mei 2016), "diakses pada" Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id